

BAGIAN ANGGARAN 089



**LAPORAN KEUANGAN
AUDITED**

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
TAHUN ANGGARAN 2022**

**NOMOR : KU.02/LPP-120/PW14/1/2023
TANGGAL : 18 APRIL 2023**

Jalan Jenderal Ahmad Yani
Pontianak 78124

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pontianak, 18 April 2023

Kepala Perwakilan,



Ayi Riyanto
NIP 197008181981031002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran	v
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	8
A.3. Basis Akuntansi	8
A.4. Dasar Pengukuran	9
A.5. Kebijakan Akuntansi	9
A.6. Program Prioritas Nasional	18
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	20
B.2. Belanja Negara	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
C.1. Aset Lancar	27
C.2. Aset Tetap	28
C.3. Aset Lainnya	35
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	37
C.5. Ekuitas	39
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	40
D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	40
D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	48
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	52
E.1. Ekuitas Awal	52
E.2. Surplus/(Defisit) LO	52
E.3. Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Ekuitas	52
E.4. Transaksi Antar Entitas	53
E.5. Ekuitas Akhir	55
F. Pengungkapan Penting Lainnya	56
F.1. Informasi Dana Bantuan Kedinasan	56

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	: Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	20
Tabel 2	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program per 31 Desember 2022	21
Tabel 3	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja per 31 Desember 2022	21
Tabel 4	: Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	22
Tabel 5	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022	22
Tabel 6	: Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	23
Tabel 7	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022	23
Tabel 8	: Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	24
Tabel 9	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022	25
Tabel 10	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	25
Tabel 11	: Rincian Belanja untuk Penanganan Pandemi COVID-19	26
Tabel 12	: Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	27
Tabel 13	: Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	27
Tabel 14	: Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	28
Tabel 15	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022	35
Tabel 16	: Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	36
Tabel 17	: Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	38
Tabel 18	: Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	38
Tabel 19	: Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022	39
Tabel 20	: Rincian PNBP per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	40
Tabel 21	: Perbandingan Realisasi Pendapatan Operasional per 31 Desember 2022 Menurut LO dan LRA	41
Tabel 22	: Rincian Beban Operasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	41
Tabel 23	: Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	42
Tabel 24	: Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 Menurut LO dan LRA	42
Tabel 25	: Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	43
Tabel 26	: Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Persediaan dan Jasa per 31 Desember 2022 Menurut LO dan LRA	44
Tabel 27	: Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	44
Tabel 28	: Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 Menurut LO dan LRA	45
Tabel 29	: Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	46
Tabel 30	: Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2022 Menurut LO dan LRA	46
Tabel 31	: Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	47
Tabel 32	: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	48

Tabel 33	: Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi COVID-19	48
Tabel 34	: Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	49
Tabel 35	: Beban Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	50
Tabel 36	: Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	51
Tabel 37	: Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	51
Tabel 38	: Rincian Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	52
Tabel 39	: Rincian Koreksi atas Reklasifikasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	53
Tabel 40	: Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	53
Tabel 41	: Rincian Biaya Bantuan Kedinasan per 31 Desember 2022	56

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Keuangan Pokok
 - A. Neraca Saldo Awal
 - B. Neraca Percobaan Basis Kas
 - C. Neraca Percobaan Basis Akruai
 - D. Laporan Realisasi Anggaran
 - E. Neraca
 - F. Laporan Operasional
 - G. Laporan Perubahan Ekuitas
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Negara
4. Laporan Barang Milik Negara
 - A. Laporan Posisi Barang Milik Negara per 31 Desember 2022
 - B. Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel per 31 Desember 2022
 - C. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel per 31 Desember 2022
 - D. Laporan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel per 31 Desember 2022
 - E. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel per 31 Desember 2022
 - F. Berita Acara Opname Fisik Persediaan per 31 Desember 2022
5. Daftar Rincian Biaya Bantuan Kedinasan per 31 Desember 2022



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan *Audited* Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, 18 April 2023

Kepala Perwakilan, /

Ayi Riyanto
NIP 197008181991031002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan *Audited* Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp74.565.500,00 atau mencapai 809,09 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp9.216.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21.592.451.586,00 atau mencapai 98,75 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp21.865.746.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 .

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp200.992.372.368,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp216.048.760,00, Aset Tetap (Neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp200.776.323.608,00, dan Aset Lainnya (Neto setelah akumulasi penyusutan/amortisasi) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp105.953.967,00 dan Rp200.886.418.401,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/(defisit) dari kegiatan operasional, surplus/(defisit) dari kegiatan non-operasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp32.453.767,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp22.217.776.923,00, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai

Rp22.185.323.156,00. Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp641.643.772,00, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp22.826.966.928,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp202.170.733.847,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp22.826.966.928,00, ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi nilai ekuitas senilai Rp42.764,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp21.542.694.246,00. Sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp200.886.418.401,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk sampai dengan 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

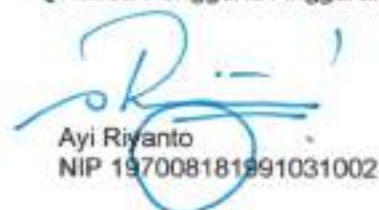
BPKP PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022			31 DES 2021 REALISASI
			ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1.				
	■ Penerimaan Negara Bukan Pajak		9.216.000,00	74.565.500,00	809,09	110.045.100,00
	Jumlah Pendapatan		9.216.000,00	74.565.500,00	809,09	110.045.100,00
B	BELANJA	B.2.				
	■ Belanja Pegawai	B.2.1.	13.525.650.000,00	13.299.696.541,00	98,33	12.592.543.495,00
	■ Belanja Barang	B.2.2.	7.836.036.000,00	7.790.475.205,00	99,42	6.551.397.383,00
	■ Belanja Modal	B.2.3.	504.060.000,00	502.279.840,00	99,65	268.046.999,00
	Jumlah Belanja		21.865.746.000,00	21.592.451.586,00	98,75	19.411.989.877,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Kuasa Pengguna Anggaran



Ayi Riyanto
NIP 197008181991031002

II. NERACA

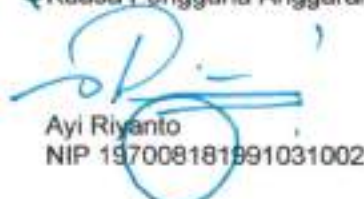
BPKP PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2022	31 DES 2021
ASET			
ASET LANCAR	C.1.		
- Persediaan	C.1.1.	216.048.760,00	213.438.581,00
JUMLAH ASET LANCAR		216.048.760,00	213.438.581,00
ASET TETAP	C.2.		
- Tanah	C.2.1.	189.634.719.000,00	189.634.719.000,00
- Peralatan dan Mesin	C.2.2.	6.538.683.270,00	6.021.561.030,00
- Gedung dan Bangunan	C.2.3.	11.862.883.000,00	12.884.431.000,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	412.445.600,00	412.445.600,00
- Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	23.990.000,00	23.990.000,00
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	28.720.000,00	28.720.000,00
- Akumulasi Penyusutan	C.2.7.	(7.725.117.262,00)	(6.933.307.430,00)
JUMLAH ASET TETAP		200.776.323.608,00	202.072.559.200,00
ASET LAINNYA	C.3.		
- Aset Tak Berwujud	C.3.1.	61.047.000,00	61.047.000,00
- Aset Lain-lain	C.3.2.	0,00	0,00
- Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	(61.047.000,00)	(53.416.125,00)
JUMLAH ASET LAINNYA		0,00	7.630.875,00
JUMLAH ASET		200.992.372.368,00	202.293.628.656,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4.		
- Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	75.831.745,00	70.510.920,00
- Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.2.	30.122.222,00	52.383.889,00
JUMLAH KEWAJIBAN		105.953.967,00	122.894.809,00
EKUITAS			
- Ekuitas	C.5.	200.886.418.401,00	202.170.733.847,00
JUMLAH EKUITAS		200.886.418.401,00	202.170.733.847,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		200.992.372.368,00	202.293.628.656,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Kuasa Pengguna Anggaran



Ayi Riyanto
NIP 197008181991031002

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BPKP PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2022	31 DES 2021
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1		
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1.1		
- Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.1.1	32.453.767,00	31.536.378,00
Jumlah Pendapatan Operasional (D.1.1.1)		32.453.767,00	31.536.378,00
BEBAN OPERASIONAL	D.1.2		
- Beban Pegawai	D.1.2.1	13.300.376.541,00	12.633.403.495,00
- Beban Persediaan	D.1.2.2	353.080.084,00	428.875.892,00
- Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	2.066.392.216,00	1.880.018.083,00
- Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	825.243.984,00	586.610.657,00
- Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	4.547.748.803,00	3.644.104.400,00
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.6	1.124.937.295,00	1.137.643.644,00
Jumlah Beban Operasional (D.1.2.1 s.d. D.1.2.6)		22.217.776.923,00	20.310.656.171,00
Surplus /(Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1+D.1.2)		(22.185.323.156,00)	(20.279.119.793,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.2		
SURPLUS / (DEFISIT) DARI PELEPASAN ASET NON LANCAR	D.2.1		
- Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.2.1.1	53.071.000,00	31.333.500,00
- Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.2.1.2	706.017.172,00	10.178.100,00
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar (D.2.1.1-D.2.1.2)		(652.946.172,00)	21.155.400,00
SURPLUS /(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.2.2		
- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.2.1	11.302.400,00	2.199.000,00
- Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.2.2	0,00	12.930.036,00
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (D.2.2.1-D.2.2.2)		11.302.400,00	(10.731.036,00)
Surplus /(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (D.2.1+D.2.2)		(641.643.772,00)	10.424.364,00
Surplus /(Defisit) Laporan Operasional (D.1+D.2)		(22.826.966.928,00)	(20.268.695.429,00)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Kuasa Pengguna Anggaran


 Ayi Riyanto
 NIP 197008187991031002

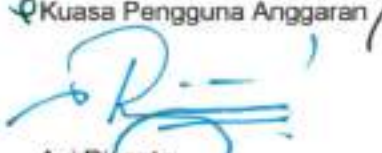
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BPKP PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2022	31 DES 2021
EKUITAS AWAL	E.1	202.170.733.847,00	202.963.897.501,00
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	E.2	(22.826.966.928,00)	(20.268.695.429,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/(MENGURANGI) NILAI EKUITAS :	E.3	(42.764,00)	(3.974.850,00)
- Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.1	0,00	(3.974.850,00)
- Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	(42.764,00)	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4		
- Ditagihkan ke Entitas Lain	E.4.1	21.592.451.586,00	19.411.989.877,00
- Diterima dari Entitas Lain	E.4.2	(74.565.500,00)	(110.045.100,00)
- Transfer Masuk	E.4.3	47.215.160,00	117.561.848,00
- Transfer Keluar	E.4.4	(22.407.000,00)	0,00
- Pengesahan Hibah Langsung	E.4.5	0,00	60.000.000,00
Jumlah Transaksi Antar Entitas		21.542.694.246,00	19.479.506.625,00
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2+E.3+E.4)		(1.284.315.446,00)	(793.163.654,00)
EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4)	E.5	200.886.418.401,00	202.170.733.847,00

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Kuasa Pengguna Anggaran /

 Ayi Riyanto
 NIP 197008191991031002

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Profil dan
Kebijakan Teknis

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada *stakeholder* dan *shareholder*. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses *governance*, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan BPKP berperan dalam mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan BPKP Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

↓ Kepala Perwakilan	: Dr. Ayi Riyanto, Ak., M.Si.
↓ Kepala Bagian Umum	: Puji Basuki, S.E.
↓ Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat	: Barlian Fransiskus Saragih, Ak.
↓ Koordinator Pengawasan Bidang APD	: Drs. Agus Dwi Praptama
↓ Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara	: Daridin, Ak., M.M.
↓ Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi	: Ade Prianto, S.E.
↓ Koordinator Pengawasan Bidang P3A	: Mujiyanto, Ak.
↓ Subkoordinator Kepegawaian	: Dheny Purnomo, S.E., M.M.
↓ Subkoordinator Keuangan	: Lilik Prasetyo, S.E.
↓ Subkoordinator Pengelolaan BMN, Rumah Tangga dan Kearsipan	: Derajat Agus Srimulyono, S.I.P.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga sebagai sarana bagi satuan kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung implementasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada seperti SAS, SILABI, SAIBA, SIMAK-BMN dan lainnya. SAKTI menerapkan konsep *single database*. Modul dalam aplikasi SAKTI antara lain modul penganggaran, komitmen, pembayaran, bendahara, persediaan, aset tetap, pelaporan dan administrator. Modul Pelaporan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan untuk Laporan Persediaan dan Aset Tetap menggunakan Modul Persediaan dan Aset.

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan

yang ditetapkan oleh BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi diakui apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan, diakui apabila terdapat ada peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Tarif Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.
- Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Jalan, Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau

pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu dicatat sebagai koreksi terhadap nilai aset yang bersangkutan pada saat pengembalian tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Barang Bercorak Kesenian)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan

Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat

Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima dimuka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Pembelian Persediaan yang belum dibayar dari Kas Negara (belum terbit SP2D) diakui sebagai Belanja yang Masih Harus Dibayar pada tanggal Neraca.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.6. Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, pada Satuan Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional PN VII memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pelaksanaannya di antaranya melalui Program Prioritas Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan, Kegiatan Prioritas Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan, Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah serta Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha dengan pagu mencapai Rp1.610.124.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.599.537.798,00.

Dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output Staregis	Target	Capaian Output Strategis	%
BPKP Kalbar	3701 UAG.U03	1.086.105.000	1.080.238.891	99,46	LHP	18	18	100,00
BPKP Kalbar	3701 UAG.U09	443.130.000	442.184.223	99,79	LHP	2	2	100,00
BPKP Kalbar	3701 UAG.U10	80.889.000	77.114.684	95,33	LHP	1	1	100,00
Total		1.610.124.000	1.599.537.798	99,34		21	21	100,00

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 semula sebesar Rp21.041.549.000,00 dan beberapa kali dilakukan revisi menjadi Rp21.865.746.000,00. Adapun revisi tersebut antara lain berupa penambahan pagu belanja barang dan belanja modal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat serta realokasi belanja begawai.

Rincian pagu Pendapatan dan Belanja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)			
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total Anggaran Belanja
Anggaran Semula	16.011.509.000,00	5.030.040.000,00	0,00	21.041.549.000,00
Tambahan Anggaran Unit Kerja TA 2022	0,00	1.043.758.000,00	0,00	1.043.758.000,00
Tambahan RM dan PFM-MDTF	0,00	2.349.298.000,00	0,00	2.349.298.000,00
Realokasi Anggaran Baseline	(1.970.561.000,00)	(211.058.000,00)	45.200.000,00	(2.136.419.000,00)
Revisi RKA Periode Oktober 2022	(515.298.000,00)	273.247.000,00	458.860.000,00	216.809.000,00
Revisi Atas Anggaran Terblokir	0,00	(649.249.000,00)	0,00	(649.249.000,00)
Anggaran Akhir	13.525.650.000,00	7.836.036.000,00	504.060.000,00	21.865.746.000,00

Sedangkan apabila dilihat dari program, maka perubahan belanja adalah sebagai berikut:

Program	Jumlah Anggaran (Rp)	
	Semula	Menjadi
Pelaksanaan Dukungan Manajemen BPKP	19.133.889.000,00	17.425.337.000,00
Program Pengawasan Pembangunan di seluruh Perwakilan BPKP	1.907.660.000,00	4.440.409.000,00
Total	21.041.549.000,00	21.865.746.000,00

Pendapatan
Negara dan Hibah
Rp74.565.500,00

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp74.565.500,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Realisasi PNBP Lainnya per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp35.479.600,00 atau 32,24 persen dibandingkan realisasi PNBP Tahun 2021 sebesar Rp110.045.100,00 disebabkan karena adanya penurunan dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dampak dari adanya pembangunan rusun ASN.

Perbandingan realisasi PNBP per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian Jenis PNBP	Realisasi PNBP (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2022	31 Des 2021	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	53.071.000,00	31.333.500,00	21.737.500,00	69,37
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.192.100,00	76.512.600,00	(66.320.500,00)	(86,68)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Laku	11.302.400,00	2.199.000,00	9.103.400,00	413,98
Total	74.565.500,00	110.045.100,00	(35.479.600,00)	(32,24)

Belanja Negara
(Rp21.592.451.586,00)

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja per 31 Desember 2022 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp21.592.451.586,00 atau 98,75 persen dari anggaran sebesar Rp21.865.746.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja menurut program per 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Menurut Program per 31 Desember 2022

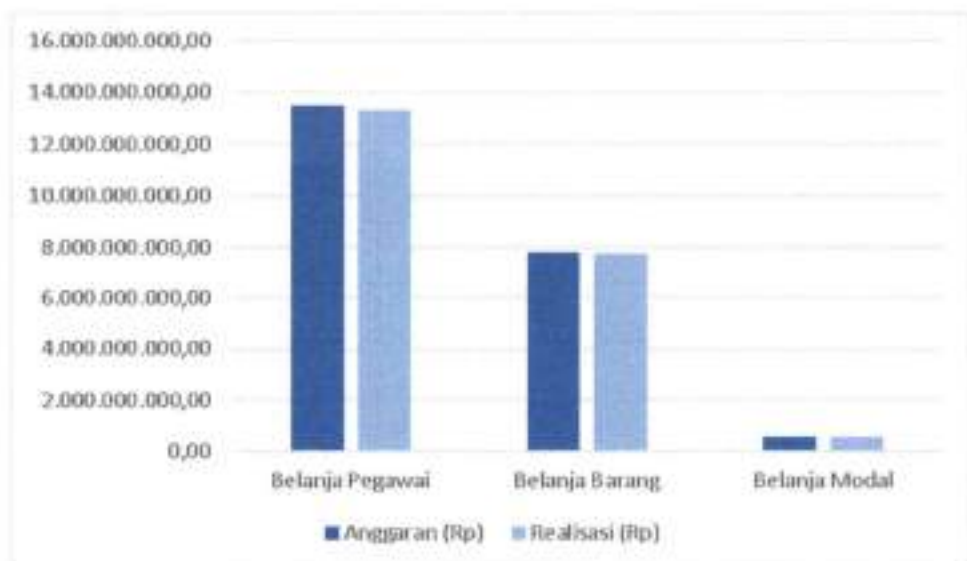
Kode Prog.	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
WA 3676	Pelaksanaan Dukungan Manajemen BPKP	17.425.337.000,00	17.192.022.999,00	98,66
CH 3701	Program Pengawasan Pembangunan di seluruh Perwakilan BPKP	4.440.409.000,00	4.400.426.587,00	99,10
Jumlah		21.865.746.000,00	21.592.451.586,00	98,75

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3
Rincian Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja per 31 Desember 2022

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
.51	Belanja Pegawai	13.525.650.000,00	13.299.696.541,00	98,33
.52	Belanja Barang	7.836.036.000,00	7.790.475.205,00	99,42
.53	Belanja Modal	504.060.000,00	502.279.840,00	99,65
Jumlah		21.865.746.000,00	21.592.451.586,00	98,75

Komposisi anggaran dan realisasi belanja disajikan dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.180.461.709,00 atau 11,23 persen dibandingkan realisasi belanja Tahun 2021 disebabkan adanya penambahan jumlah pegawai sebanyak 21 orang sehingga meningkatkan belanja pegawai, bertambahnya kegiatan pengawasan dalam rangka Agenda Prioritas Pengawasan (APP) percepatan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural yang menyebabkan meningkatnya belanja barang, serta peningkatan belanja modal untuk tahun 2022.

Perbandingan realisasi belanja per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
		31 Des 2022	31 Des 2021	Jumlah (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	13.299.696.541,00	12.592.543.495,00	707.153.046,00	5,62
52	Belanja Barang	7.790.475.205,00	6.551.397.383,00	1.239.077.822,00	18,91
53	Belanja Modal	502.279.840,00	268.048.999,00	234.230.841,00	87,38
	Total	21.592.451.586,00	19.411.989.877,00	2.180.461.709,00	11,23

Belanja Pegawai
Rp13.299.696.541,00

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp13.299.696.541,00 dan Rp12.592.543.495,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.929.989.000,00	5.918.864.653,00	99,81
Belanja Lembur	587.088.000,00	586.651.000,00	99,93
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	7.008.573.000,00	6.794.180.888,00	96,94
Total	13.525.650.000,00	13.299.696.541,00	98,33

Realisasi belanja pegawai (*netto*) sebesar Rp 13.299.696.541,00 berasal dari belanja pegawai (*bruto*) sebesar Rp13.306.327.818,00 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp6.631.277,00.

Dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2021, terdapat peningkatan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp707.153.046,00 atau 5,62 persen disebabkan karena adanya penambahan pegawai sebanyak 21 orang, penambahan anggaran lembur dan pembayaran tunjangan kinerja untuk THR dan gaji ketigabelas tahun 2022.

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2022	31 Des 2021	Jumlah (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.918.864.653,00	5.888.392.229,00	30.472.424,00	0,52
Belanja Lembur	586.651.000,00	421.873.000,00	164.778.000,00	39,06
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	6.794.180.888,00	6.282.278.266,00	511.902.622,00	8,15
Total	13.299.696.541,00	12.592.543.495,00	707.153.046,00	5,62

Belanja Barang
Rp7.790.475.205,00

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp7.790.475.205,00 dan Rp6.551.397.383,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	1.543.936.000,00	1.543.423.333,00	99,97
Belanja Barang Non Operasional	108.561.000,00	108.435.797,00	99,88
Belanja Barang Persediaan	356.003.000,00	355.733.027,00	99,92
Belanja Jasa	410.293.000,00	409.892.261,00	99,90
Belanja Pemeliharaan	825.966.000,00	825.243.984,00	99,91
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.591.277.000,00	4.547.746.803,00	99,05
Total	7.836.036.000,00	7.790.475.205,00	99,42

Realisasi belanja barang (*netto*) sebesar Rp7.790.475.205,00 berasal dari belanja barang (*bruto*) sebesar Rp7.794.845.322,00 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp4.370.117,00.

Dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2021, terdapat kenaikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp1.239.077.822,00 atau 18,91 persen antara lain disebabkan bertambahnya kegiatan pengawasan dalam rangka Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang menyebabkan meningkatnya belanja perjalanan dinas dalam negeri, adanya pengecatan gedung yang menyebabkan meningkatnya belanja pemeliharaan, serta adanya kegiatan *workshop* yang menyebabkan meningkatnya belanja barang non operasional pada tahun 2022.

Perbandingan realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2022	31 Des 2021	Jumlah (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	1.543.423.333,00	1.478.967.606,00	64.455.727,00	4,36
Belanja Barang Non Operasional	108.435.797,00	52.677.451,00	55.758.346,00	105,85
Belanja Barang Persediaan	355.733.027,00	447.448.650,00	(91.715.623,00)	(20,50)
Belanja Jasa	409.892.261,00	341.588.619,00	68.303.642,00	20,00
Belanja Pemeliharaan	825.243.984,00	586.610.657,00	238.633.327,00	40,68
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.547.746.803,00	3.644.104.400,00	903.642.403,00	24,80
Total	7.790.475.205,00	6.551.397.383,00	1.239.077.822,00	18,91

Belanja Modal
Rp502.279.840,00

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp502.279.840,00 dan Rp 268.048.999,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	504.060.000,00	502.279.840,00	99,65
Total	504.060.000,00	502.279.840,00	99,65

Realisasi belanja modal (*netto*) sebesar Rp502.279.840,00 berasal dari belanja modal (*bruto*) sebesar Rp502.279.840,00 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp0,00.

Dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2021, terdapat peningkatan realisasi Belanja Modal sebesar Rp234.230.841,00 atau 87,38 persen antara lain disebabkan terdapat alokasi tambahan belanja modal pada triwulan IV untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor pada tahun 2022.

Perbandingan realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2022	31 Des 2021	Jumlah (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	502.279.840,00	231.968.999,00	270.310.841,00	116,53
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	36.080.000,00	(36.080.000,00)	(100,00)
Total	502.279.840,00	268.048.999,00	234.230.841,00	87,38

Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 Rp381.413.362,00

B.2.4. Belanja Penanganan Pandemi COVID-19

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat telah mengalokasikan anggaran belanja dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp384.995.000,00. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp381.413.362,00 dengan rincian yang tersaji pada Tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11
Rincian Belanja untuk Penanganan Pandemi COVID-19

No	Akun	Alokasi Anggaran/DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	521841	63.406.000,00	63.404.570,00	Belanja Persediaan
2.	522192	2.125.000,00	2.125.000,00	Belanja Jasa
3.	524115	319.464.000,00	315.683.792,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Total		384.995.000,00	381.413.362,00	

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp216.048.760,00

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp216.048.760,00 dan Rp213.438.581,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 12 berikut ini:

Tabel 12
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Aset Lancar	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Persediaan	216.048.760,00	213.438.581,00
	Total	216.048.760,00	213.438.581,00

Persediaan
Rp216.048.760,00

C.1.1. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp216.048.760,00 dan Rp213.438.581,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 13 berikut ini:

Tabel 13
Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Jenis Persediaan	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
Barang Konsumsi	152.268.979,00	91.701.681,00
Persediaan Lainnya	63.779.781,00	121.736.900,00
Jumlah	216.048.760,00	213.438.581,00

Selama tahun 2022 terdapat persediaan dalam kondisi usang yang telah dilakukan penghapusan sesuai surat keputusan Sekretaris Utama BPKP nomor PL.07/KEP-553/K.SU/05/2022 tanggal 28 Juli 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
Barang Konsumsi	11.707.560,00
Persediaan Lainnya	1.222.476,00
Jumlah	12.930.036,00

Dari keseluruhan persediaan pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp216.048.760,00, terdapat persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp45.787.619,00 disajikan pada tabel berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Cloviar 500 Mg	120	1.870.440,00
2	Ceptik 200 Mg	20	563.200,00
3	Levovid 500 Mg	10	389.730,00
4	Moxbat	45	1.316.700,00
5	Isoprinosine	16	222.208,00
6	Isprinol 500 Mg	95	1.189.545,00
7	Inclovir 500 mg	84	1.904.532,00
8	Interpec	1.410	1.628.550,00
9	Epexol	1.050	1.108.800,00
10	Promedex	730	1.043.900,00
11	Tuzalos	208	249.392,00
12	Sincronik	20	218.820,00
13	Inhipraz	10	159.390,00
14	Gastrolan	20	242.520,00
15	Zegavit	30	147.630,00
16	Hand Sanitizer 500 ml	2	79.800,00
17	Hand Sanitizer 5 L	4	832.000,00
18	Baju Hazmat	48	27.359.952,00
19	Face Shield	240	1.864.560,00
20	Disinfektan 5 liter	4	1.180.000,00
21	Hand Sanitizer 55 ml	49	565.950,00
22	Thermogun	2	1.650.000,00
Jumlah			45.787.619,00

Aset Tetap
Rp200.776.323.608,00

C.2. Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp200.776.323.608,00 dan Rp202.072.559.200,00, yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 14 berikut ini:

Tabel 14
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Tanah	189.634.719.000,00	189.634.719.000,00
2	Peralatan dan Mesin	6.538.683.270,00	6.021.561.030,00
3	Gedung dan Bangunan	11.862.883.000,00	12.884.431.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	412.445.600,00	412.445.600,00
5	Aset Tetap Lainnya	23.990.000,00	23.990.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	28.720.000,00	28.720.000,00
Nilai Perolehan		208.601.440.870,00	209.005.866.630,00
7	Akumulasi Penyusutan	(7.725.117.262,00)	(6.933.307.430,00)
Nilai Buku		200.776.323.608,00	202.072.559.200,00

Tanah
Rp189.634.719.000,00

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki BPKP per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp189.634.719.000,00 dan Rp189.634.719.000,00.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	189.634.719.000,00
Mutasi Tambah:	
- Reklasifikasi Masuk	113.851.990.000,00
- Saldo Awal	6.517.000.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	120.368.990.000,00
Mutasi Kurang:	
- Reklasifikasi Keluar	(113.851.990.000,00)
- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(6.517.000.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(120.368.990.000,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	189.634.719.000,00

Transaksi penambahan dan pengurangan nilai Tanah sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- Reklasifikasi masuk sebesar Rp113.851.990.000,00 merupakan kesalahan pencatatan Tanah. Rincian reklasifikasi masuk sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	3.494	56.925.995.000,00
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.494	56.925.995.000,00
Jumlah			113.851.990.000,00

- Saldo Awal Tanah sebesar Rp6.517.000.000,00 merupakan pencatatan nilai Tanah seluas 400 m² yang akan dilakukan proses hibah kepada Pemerintah Kota Pontianak untuk kepentingan pembangunan trotoar sebagai fasilitas umum, sesuai surat permohonan hibah Wali Kota Pontianak nomor 620/470/BKD/Aset.04/2022 tanggal 14 Juli 2022. Rincian saldo awal sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	400	6.517.000.000,00
Jumlah			6.517.000.000,00

- Reklasifikasi keluar sebesar Rp113.851.990.000,00 merupakan kesalahan pencatatan Tanah. Rincian reklasifikasi keluar sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	3.494	56.925.995.000,00
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.494	63.442.995.000,00
Jumlah			113.851.990.000,00

- Koreksi Pencataan Nilai Berkurang sebesar Rp6.517.000.000,00 koreksi pencatatan saldo tanah yang akan dilakukan proses hibah. Rincian koreksi pencataan nilai berkurang sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	400	6.517.000.000,00
Jumlah			6.517.000.000,00

Nilai perolehan Tanah tersebut terdiri dari 15 sertifikat hak milik seluas 22.186 m², yang terletak di berbagai lokasi di Pontianak. Dari luas tanah 22.186 m², seluas 7.909 m² digunakan untuk keperluan bangunan kantor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan sisanya tanah seluas 14.277 m² digunakan untuk bangunan rumah negara. Semua persil tanah Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq BPKP.

Peralatan dan Mesin
Rp6.538.683.270,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp6.538.683.270,00 dan Rp6.021.561.030,00. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.040.824.960,00 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp1.497.858.310,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan berikut ini:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	6.021.561.030,00
Mutasi Tambah:	
- Transfer Masuk	67.390.400,00
- Pembelian	502.279.840,00
Jumlah Mutasi Tambah	569.670.240,00
Mutasi Kurang:	
- Transfer Keluar	(52.548.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(52.548.000,00)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	6.538.683.270,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(5.040.824.960,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	1.497.858.310,00

Transaksi penambahan dan pengurangan nilai Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- Transfer Masuk sebesar Rp67.390.400,00 dengan Berita Acara Serah Terima nomor BAST-54/PW04/1/2022 Tanggal 12 Januari 2022, PL.04/BAST-19/SU05/3/2022 Tanggal 16 Juni 2022, BA-4865/DL.1/2022 Tanggal 23 September 2022 dan BA-

6993/DL.1/2022 Tanggal 19 Desember 2022 merupakan peralatan dan mesin yang diterima dari Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa BPKP, Pusdiklatwas BPKP serta Perwakilan BPKP Provinsi Riau pada tahun 2022, sebagaimana dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan pada Perubahan Ekuitas. Rincian transfer masuk sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	LCD Projector/Infocus	1	9.750.000,00
2	Tablet PC	1	12.990.000,00
3	Audio Visual	2	19.550.400,00
4	Note Book	1	20.000.000,00
5	Printer	1	5.100.000,00
Jumlah			67.390.400,00

- Pembelian sebesar Rp502.279.840,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Sepeda Motor	1	23.570.000,00
2	Gergaji Chain Saw	1	5.295.255,00
3	CCTV - Camera Control Television System	1	20.535.000,00
4	Meja Kerja Kayu	40	87.890.000,00
5	Sice	7	60.930.782,00
6	Meja Rapat	2	12.399.008,00
7	Mesin Pel/Poles	1	11.222.100,00
8	Mesin Pemotong Rumput	1	7.097.895,00
9	A.C. Split	22	165.811.800,00
10	Loudspeaker	1	7.763.000,00
11	Microphone/Wireless MIC	1	4.275.000,00
12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	35	95.690.000,00
Jumlah			502.279.840,00

- Transfer Keluar sebesar Rp52.548.000,00 dengan Berita Acara Serah Terima nomor BAST-212/PW14/1/2022 Tanggal 7 Februari 2022, merupakan peralatan dan mesin yang diserahkan ke Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa BPKP pada tahun 2022, sebagaimana dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan pada Perubahan Ekuitas. Rincian transfer keluar sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Handphone Encryption	1	16.700.000,00
2	Lap Top	1	22.148.000,00
3	Tablet PC	1	13.700.000,00
Jumlah			52.548.000,00

Selain nilai Peralatan dan Mesin tersebut di atas, terdapat pembelian Peralatan dan Mesin yang tidak dicatat di Neraca, namun dicatat secara ekstrakomptabel karena nilainya tidak memenuhi syarat

kapitalisasi sebesar Rp47.995.950,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Kursi Besi/Metal	80	38.400.000,00
2	Kursi Kayu	20	9.595.950,00
Jumlah		100	47.995.950,00

Sehingga nilai Peralatan dan Mesin yang dicatat secara ekstrakomptabel sebesar Rp47.995.950,00.

Gedung dan
Bangunan
Rp11.862.883.000,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp11.862.883.000,00 dan Rp12.884.431.000,00. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.437.878.027,00, sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah Rp9.425.004.973,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	12.884.431.000,00
Mutasi Tambah:	
- Reklasifikasi Masuk	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang:	
- Penghentian Aset dari penggunaan	(1.021.548.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(1.021.548.000,00)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	11.862.883.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(2.437.878.027,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	9.425.004.973,00

Transaksi pengurangan nilai Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu berupa penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp1.021.548.000,00. Reklasifikasi tersebut sehubungan dengan rencana Pembangunan Rusun ASN bagi Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, terdapat 11 (sebelas) unit rumah dinas yang terkena dampak sebagai lokasi pembagunan rusun ASN. Sehingga rumah dinas tersebut telah dilakukan pengajuan penghapusan rumah negara dengan surat nomor PL.07/S-1050/PW14/1/202 Tanggal 3 Agustus 2022. Rincian penghentian aset dari penggunaan sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	11	1.021.548.000,00
Jumlah			1.021.548.000,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp412.445.600,00

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp412.445.600,00 dan Rp412.445.600,00. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp244.484.275,00. sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan sebesar Rp167.961.325,00.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	412.445.600,00
Mutasi Tambah:	
- Pengembangan KDP	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang:	
- Penghentian Aset dari Penggunaan	(0,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(0,00)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	412.445.600,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(244.484.275,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	167.961.325,00

Aset Tetap Lainnya
Rp23.990.000,00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp23.990.000,00 dan Rp23.990.000,00 yang merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.930.000,00, sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp22.060.000,00.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	23.990.000,00
Mutasi Tambah:	
- Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang:	
- Transaksi Normalisasi BMN	(0,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(0,00)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	23.990.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(1.930.000,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	22.060.000,00

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp28.720.000,00

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp28.720.000,00 dan Rp28.720.000,00.

Mutasi saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai perolehan per 31 Desember 2021	28.720.000,00
Mutasi Tambah:	
- Perolehan/Penambahan KDP	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang:	
- Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(0,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(0,00)
Nilai buku per 31 Desember 2022	28.720.000,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp28.720.000,00 merupakan penyelesaian KDP yang masih tertunda dikarenakan pada tahun 2020 telah di rencanakan pembangunan rumah negara senilai Rp709.285.000,00 namun mengalami realokasi anggaran ke belanja penanganan COVID-19 sebesar Rp680.565.000,00.

Sampai dengan bulan April 2020 pembangunan rumah negara tersebut baru sampai pada tahap perencanaan yaitu pembuatan desain bangunan rumah dinas dengan menyerap dana Rp28.720.000,00 atau 4,05 persen dari target yang diharapkan sampai selesai.

Hingga saat ini, proses pelaksanaan untuk melanjutkan KDP ditunda kembali karena pada tahun 2022 tidak ada alokasi anggaran belanja modal gedung dan bangunan.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp7.725.117.262,00)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp7.725.117.262,00 dan Rp6.933.307.430,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan KDP. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 15 berikut ini:

Tabel 15
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	189.634.719.000,00	0,00	189.634.719.000,00
2	Peralatan dan Mesin	6.538.683.270,00	5.040.824.960,00	1.497.858.310,00
3	Gedung dan Bangunan	11.862.883.000,00	2.437.878.027,00	9.425.004.973,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	412.445.600,00	244.484.275,00	167.961.325,00
5	Aset Tetap Lainnya	23.990.000,00	1.930.000,00	22.060.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	28.720.000,00	0,00	28.720.000,00
	Total	208.501.440.870,00	7.725.117.262,00	200.776.323.608,00

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo per 31/12/2021 (Rp)	Saldo per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6)	(7) = (6) - (5)
1	Peralatan dan Mesin	4.453.109.829,00	5.040.824.960,00	587.715.131,00	597.680.891,00	9.965.760,00
2	Gedung dan Bangunan	2.276.406.265,00	2.437.878.027,00	161.469.761,00	477.000.589,00	315.530.828,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	201.859.335,00	244.484.275,00	42.624.940,00	42.624.940,00	0,00
4	Aset Tetap Lainnya	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	8.933.307.430,00	7.725.117.262,00	223.122.412,00	560.349.240,00	325.496.568,00

Penjelasan atas selisih tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Jumlah
1	Penghentian Aset dari Penggunaan	0,00	315.530.828,00	315.530.828,00
2	Reklasifikasi	0,00	0,00	0,00
3	Transfer Keluar	30.141.000,00	0,00	30.141.000,00
4	Transfer Masuk	(20.175.240,00)	0,00	(20.175.240,00)
5	Hibah Masuk	0,00	0,00	0,00
	Total	9.965.760,00	315.530.828,00	325.496.568,00

Aset Lainnya
Rp0,00

C.3. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp7.630.875,00, merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 16 berikut ini:

Tabel 16
Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	61.047.000,00	61.047.000,00
2	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	Nilai Perolehan	61.047.000,00	61.047.000,00
3	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	61.047.000,00	(53.416.125,00)
	Nilai Buku	0,00	7.630.875,00

Aset Tak Berwujud
Rp61.047.000,00

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp61.047.000,00 dan Rp61.047.000,00. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp61.047.000,00, sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik, yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, berupa *Software* dan lisensi.

Mutasi nilai Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	61.047.000,00
Mutasi Tambah:	
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang:	
- Penghapusan	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	61.047.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(61.047.000,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	0,00

Aset Lain-Lain
Rp0,00

C.3.2. Aset Lain-Lain

Nilai perolehan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPKP. Aset tersebut dalam proses penghapusan dari BMN, sehingga tidak digolongkan dalam kategori Aset Tetap namun digolongkan ke dalam Aset Lain-Lain.

Mutasi nilai Aset Lain-Lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	0,00
Mutasi Tambah:	
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1.021.548.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	1.021.548.000,00
Mutasi Kurang:	
- Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(1.021.548.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(1.021.548.000,00)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(0,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	0,00

Transaksi penambahan dan pengurangan nilai Aset Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp1.021.548.000,00 merupakan transaksi yang disebabkan karena perubahan kondisi aset tetap menjadi aset yang dihentikan penggunaannya. Rincian aset tetap ke aset lainnya sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	11	1.021.548.000,00
Jumlah			1.021.548.000,00

- Penghapusan sebesar Rp1.021.548.000,00 merupakan penghapusan aset karena kondisi BMN akan dilakukan pembongkaran untuk pembangunan rusun ASN melalui mekanisme lelang sesuai surat persetujuan penghapusan nomor PL.07/S-1308/SU/05/2022 Tanggal 12 Agustus 2022. Rincian penghapusan sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	11	1.021.548.000,00
Jumlah			1.021.548.000,00

Kewajiban Jangka Pendek
Rp105.953.967,00

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp105.953.967,00 dan Rp122.894.809,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 17 berikut ini:

Tabel 17

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	75.831.745,00	70.510.920,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	30.122.222,00	52.383.889,00
	Total	105.953.967,00	122.894.809,00

Utang Kepada Pihak
Ketiga
Rp75.831.745,00

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp75.831.745,00 dan Rp70.510.920,00. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 18 berikut ini:

Tabel 18

Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
1	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	41.540.000,00	40.860.000,00
2	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	34.291.745,00	29.650.920,00
	Total Utang Kepada Pihak Ketiga	75.831.745,00	70.510.920,00

Rincian belanja pegawai yang masih harus dibayar per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai
1.	Belanja Pegawai Uang Makan Bulan Desember 2022	41.290.000,00
2.	Belanja Pegawai Kekurangan Gaji Bulan Desember 2022	250.000,00
	Total	41.540.000,00

Rincian belanja barang yang masih harus dibayar per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai
1.	Belanja Barang Tagihan Air Bulan Desember 2022	2.269.000,00
2.	Belanja Barang Tagihan Listrik Bulan Desember 2022	26.552.469,00
3.	Belanja Barang Tagihan Telepon Bulan Desember 2022	4.052.652,00
4.	Belanja Barang Tagihan Pos Bulan Desember 2022	1.417.624,00
	Total	34.291.745,00

Pendapatan
Diterima Dimuka
Rp30.122.222,00

C.4.2. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp30.122.222,00 dan Rp52.383.889,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pengakuan kewajiban perhitungan akrual per tanggal Neraca atas

pendapatan dari transaksi sewa Barang Milik Negara (BMN) yang diterima terlebih dahulu.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 19 berikut ini:

Tabel 19
Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022

No	Obyek Sewa	Jangka Waktu (Periode)	Nilai Sewa (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2022 (Rp)
1	ATM BRI	3 Tahun (1 Mei 2021 s.d. 30 April 2024)	66.785.000,00	29.682.222,00
2	Ruangan untuk Kantin	1 Tahun (1 Mei 2022 s.d. 30 April 2023)	660.000,00	220.000,00
3	Ruangan untuk Koperasi	1 Tahun (1 Mei 2022 s.d. 30 April 2023)	660.000,00	220.000,00
Total			68.105.000,00	30.122.222,00

Ekuitas
Rp200.886.418.401,00

C.5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp200.886.418.401,00 dan Rp202.170.733.847,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan Operasional
(Rp22.185.323.156,00)

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Defisit dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp22.185.323.156,00 dan Rp20.279.119.793,00. Jumlah per 31 Desember 2022 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp32.453.767,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp22.217.776.923,00.

Pendapatan
Operasional
Rp32.453.767,00

D.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp32.453.767,00 dan Rp31.536.378,00. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Penerimaan
Negara Bukan
Pajak
Rp32.453.767,00

D.1.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp32.453.767,00 dan Rp31.536.378,00.

Kenaikan PNBP tersebut dikarenakan peningkatan jumlah rumah dinas yang dihuni pada periode semester I tahun 2022 sebelum di hapuskannya beberapa rumah dinas.

Rincian PNBP per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 20 berikut ini:

Tabel 20
Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2022	31 Des 2021	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	32.453.767,00	31.536.378,00	917.389,00	2,91
Total	32.453.767,00	31.536.378,00	917.389,00	2,91

Jika realisasi per 31 Desember 2022 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp22.261.667,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 21 berikut ini :

Tabel 21
Perbandingan Realisasi Pendapatan Operasional
per 31 Desember 2022 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	32.453.767,00	10.192.100,00	22.261.667,00
Total	32.453.767,00	10.192.100,00	22.261.667,00

Selisih Pendapatan Operasional menurut LO dan LRA sebesar Rp22.261.667,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan sewa diterima s.d 2021 untuk masa pemanfaatan tahun 2022	52.383.889,00
Pendapatan diterima s.d. 2022, namun masa pemanfaatan aset melewati 2022	(30.122.222,00)
Total	22.261.667,00

Beban Operasional
 Rp22.217.776.923,00

D.1.2. Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp22.217.776.923,00 dan Rp20.310.656.171,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional. Rincian Beban Operasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 22 berikut ini:

Tabel 22
Rincian Beban Operasional
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2022	31 Des 2021	Jumlah (Rp)	%
Beban Pegawai	13.300.376.541,00	12.633.403.495,00	666.973.046,00	5,28
Beban Persediaan	353.080.084,00	428.875.892,00	(75.795.808,00)	(17,87)
Beban Barang dan Jasa	2.068.392.216,00	1.880.018.083,00	188.374.133,00	9,91
Beban Pemeliharaan	825.243.984,00	586.610.657,00	238.633.327,00	40,68
Beban Perjalanan Dinas	4.547.746.803,00	3.644.104.400,00	903.642.403,00	24,80
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.124.937.295,00	1.137.643.644,00	(12.706.349,00)	(1,12)
Total	22.217.776.923,00	20.310.656.171,00	1.907.120.752,00	9,39

Beban Pegawai
 Rp13.300.376.541,00

D.1.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar

Rp13.300.376.541,00 dan Rp12.633.403.495,00.

Kenaikan Beban Pegawai tersebut disebabkan karena penambahan pegawai sebanyak 21 orang, penambahan anggaran lembur dan adanya pembayaran tunjangan kinerja untuk THR dan gaji ketigabelas tahun 2022.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 23 berikut ini:

Tabel 23
Rincian Beban Pegawai
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2022	31 Des 2021	Jumlah (Rp)	%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	5.919.544.653,00	5.929.252.229,00	(9.707.576,00)	(0,16)
Beban Lembur	586.651.000,00	421.873.000,00	164.778.000,00	39,06
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	6.794.180.888,00	6.282.278.266,00	511.902.622,00	8,15
Total	13.300.376.541,00	12.633.403.495,00	666.973.046,00	5,28

Jika realisasi LO per 31 Desember 2022 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp680.000,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 24 berikut ini:

Tabel 24
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2022 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	5.919.544.653,00	5.918.864.653,00	680.000,00
Beban Lembur	586.651.000,00	586.651.000,00	0,00
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	6.794.180.888,00	6.794.180.888,00	0,00
Total	13.306.327.818	13.299.696.541,00	680.000,00

Selisih Beban Pegawai menurut LO dan LRA sebesar Rp680.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Beban Belanja Pegawai Uang Makan Tahun 2021 yang masih harus dibayar di Tahun 2022	(40.860.000,00)
Beban Belanja Pegawai Uang Makan Tahun 2022 yang masih harus dibayar di Tahun 2023	41.290.000,00
Beban Belanja Pegawai Kekurangan Gaji Tahun 2022 yang masih harus dibayar di Tahun 2023	250.000,00
Total	680.000,00

Beban Persediaan
Rp353.080.084,00

D.1.2.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp353.080.084,00 dan Rp428.875.892,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai.

Penurunan Beban Persediaan tersebut dikarenakan penurunan dalam penggunaan persediaan selama tahun 2022.

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 25 berikut ini:

Tabel 25
Rincian Beban Persediaan
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2022	31 Des 2021	Jumlah (Rp)	%
Beban Persediaan Konsumsi	195.942.582,00	223.944.595,00	(28.002.013,00)	(12,50)
Beban Persediaan Lainnya	157.137.502,00	204.931.297,00	(47.793.795,00)	(23,32)
Total	353.080.084,00	428.875.892,00	(75.795.808,00)	(17,67)

Realisasi Belanja Barang Persediaan per 31 Desember 2022 menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih dengan LO sebesar minus Rp2.652.943,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 26 berikut ini:

Tabel 26
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Persediaan
Per 31 Desember 2022 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Persediaan Konsumsi	195.942.582,00	231.560.810,00	(35.618.228,00)
Beban Persediaan Lainnya	157.137.502,00	60.767.647,00	96.369.855,00
Beban Persediaan - Penanganan Pandemi Covid	0,00	63.404.570,00	(63.404.570,00)
Total	353.080.084,00	355.733.027,00	(2.652.943,00)

Selisih realisasi Beban Persediaan sebesar minus Rp2.652.943,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Persediaan	213.438.581,00
Saldo Akhir Persediaan	(216.048.760,00)
Koreksi Nilai Persediaan	(42.764,00)
Total	(2.652.943,00)

Beban Barang dan
Jasa
Rp2.066.392.216,00

D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.066.392.216,00 dan Rp1.880.018.083,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Kenaikan Beban Barang dan Jasa tersebut dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan operasional kantor untuk kegiatan sehari-hari selama tahun 2022.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 27 berikut ini:

Tabel 27
Rincian Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2022	31 Des 2021	Jumlah (Rp)	%
Beban Barang Operasional	1.544.840.957,00	1.478.967.606,00	65.873.351,00	4,45
Beban Barang Non Operasional	108.435.797,00	52.677.451,00	55.758.346,00	105,85
Beban Jasa	413.115.462,00	348.373.026,00	64.742.436,00	18,58
Total	2.066.392.216,00	1.880.018.083,00	186.374.133,00	9,91

Jika realisasi LO per 31 Desember 2022 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp4.640.825,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 28 berikut ini:

Tabel 28
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2022 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Barang Operasional	1.544.840.957,00	1.543.423.333,00	1.417.624,00
Beban Barang Non Operasional	108.435.797,00	108.435.797,00	0,00
Beban Jasa	413.115.462,00	409.892.261,00	3.223.201,00
Total	2.066.392.216,00	2.061.751.391,00	4.640.825,00

Selisih realisasi Beban Jasa sebesar Rp4.640.825,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pembayaran langganan listrik tahun 2022 atas beban yang terutang tahun 2021	(24.343.082,00)
Pembayaran langganan telepon tahun 2022 atas beban yang terutang tahun 2021	(4.056.638,00)
Pembayaran langganan air tahun 2022 atas beban yang terutang tahun 2021	(1.251.200,00)
Beban langganan listrik yang masih harus dibayarkan pada tahun 2023	26.552.469,00
Beban langganan air yang masih harus dibayarkan pada tahun 2023	2.289.000,00
Beban langganan telepon yang masih harus dibayarkan pada tahun 2023	4.052.652,00
Beban langganan pos yang masih harus dibayarkan pada tahun 2023	1.417.624,00
Total	4.640.825,00

Beban
Pemeliharaan
Rp825.243.984,00

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp825.243.984,00 dan Rp586.610.657,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Kenaikan Beban Pemeliharaan tersebut dikarenakan

adanya peningkatan kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin sampai dengan tahun 2022.

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 29 berikut ini:

Tabel 29
Rincian Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2022	31 Des 2021	Jumlah (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	503.368.148,00	315.208.083,00	188.160.065,00	59,69
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	321.875.836,00	271.402.574,00	50.473.262,00	18,60
Total	825.243.984,00	586.610.657,00	238.633.327,00	40,68

Jika realisasi LO per 31 Desember 2022 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp0,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 30 berikut ini:

Tabel 30
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pemeliharaan
Per 31 Desember 2022 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	503.368.148,00	503.368.148,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	321.875.836,00	321.875.836,00	0,00
Total	825.243.984,00	825.243.984,00	0,00

Beban Perjalanan
Dinas
Rp4.547.746.803,00

D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp4.547.746.803,00 dan Rp3.644.104.400,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Kenaikan Beban Perjalanan Dinas tersebut dikarenakan bertambahnya kegiatan pengawasan dalam rangka Agenda Prioritas Pengawasan (APP) selama tahun 2022.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 31 berikut ini:

Tabel 31
Rincian Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2022	31 Des 2021	Jumlah (Rp)	%
Beban Perjalanan Biasa	3.645.663.011,00	1.309.219.261,00	2.336.443.750,00	178,46
Beban Perjalanan Dinas-Dalam Kota	586.200.000,00	168.750.000,00	417.450.000,00	247,38
Beban Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi COVID-19	315.883.792,00	2.166.135.139,00	(1.850.251.347,00)	(85,42)
Total	4.547.746.803,00	3.644.104.400,00	903.642.403,00	24,80

Realisasi Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 sama dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1.124.937.295,00

D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.124.937.295,00 dan Rp1.137.643.644,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 32 berikut :

Tabel 32
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2022	31 Des 2021	Jumlah (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	597.680.891,00	571.567.731,00	26.113.160,00	4,57
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	477.000.589,00	508.189.223,00	(31.188.634,00)	(6,14)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	42.624.940,00	42.624.940,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Software	7.630.875,00	15.261.750,00	(7.630.875,00)	(50,00)
Total	1.124.937.295,00	1.137.643.644,00	(12.706.349,00)	(1,12)

D.1.2.7. Beban Khusus Penanganan Pandemi COVID-19

Beban khusus penanganan pandemi COVID-19 disajikan pada Tabel 33 berikut ini:

Tabel 33
Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi COVID-19

Akun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
522192	Beban Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	2.125.000,00	2.125.000,00	100,00
524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	319.464.000,00	315.883.792,00	98,88
	Total	321.589.000,00	318.008.792,00	98,89

Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional
(Rp641.643.772,00)

D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar minus Rp641.643.772,00 dan Rp10.424.364,00. Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 sebesar Rp641.643.772,00 tersebut merupakan Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp652.946.172,00 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp11.302.400,00.

Surplus/(Defisit)
dari Pelepasan Aset
Non Lancar
(Rp652.946.172,00)

D.2.1. Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar minus Rp652.946.172,00, dan Rp21.155.400,00. Jumlah Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2022 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Pelepasan Aset Non

Lancar sebesar Rp53.071.000,00 dikurangi Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp706.017.172,00.

*Pendapatan
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp53.071.000,00*

D.2.1.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp53.071.000,00 dan Rp31.333.500,00. Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp53.071.000,00 merupakan penerimaan atas penjualan aset yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional.

Kenaikan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar tersebut dikarenakan adanya penjualan aset berupa puing-puing atas pembongkaran rumah dinas pada tahun 2022.

Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 34 berikut ini:

Tabel 34
Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2022	31 Des 2021	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan dari Pemindah-tanganan BMN Lainnya	53.071.000,00	31.333.500,00	21.737.500,00	69,37
Total	53.071.000,00	31.333.500,00	21.737.500,00	69,37

Realisasi Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2022 sama dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama.

*Beban Pelepasan
Aset Non Lancar
Rp706.017.172,00*

D.2.1.2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp706.017.172,00 dan Rp10.178.100,00. Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp706.017.172,00 merupakan nilai buku aset yang dihapus pada tanggal neraca karena adanya pelepasan hak atas aset tersebut sebagaimana telah

diuraikan pada penjelasan pos-pos neraca.

Kenaikan Beban Pelepasan Aset Non Lancar tersebut dikarenakan adanya penghapusan dari aset BMN berupa 11 rumah dinas yang berpengaruh terhadap Beban Kerugian Pelepasan Aset.

Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 35 berikut ini:

Tabel 35
Beban Pelepasan Aset Non Lancar
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2022	31 Des 2021	Jumlah (Rp)	%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	706.017.172,00	10.178.100,00	695.839.072,00	6836,63
Total	706.017.172,00	10.178.100,00	695.839.072,00	6836,63

Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp11.302.400,00

D.2.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp11.302.400,00 dan minus Rp10.731.036,00. Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.302.400,00 merupakan selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp11.302.400,00 dikurangi Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,00.

Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp11.302.400,00

D.2.2.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp11.302.400,00 dan Rp2.199.000,00.

Kenaikan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut dikarenakan pengembalian belanja pegawai pada tahun 2022 lebih banyak jika dibandingkan tahun lalu.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

disajikan pada Tabel 36 berikut ini:

Tabel 36
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2022	31 Des 2021	Jumlah (Rp)	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	11.302.400,00	2.199.000,00	9.103.400,00	413,98
Total	11.302.400,00	2.199.000,00	9.103.400,00	413,98

Realisasi Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2022 sama dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama.

Beban dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp0,00

D.2.2.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp 12.930.036,00.

Penurunan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut dikarenakan tidak ada transaksi Beban Persediaan yang telah rusak/usang maupun beban penyesuaian nilai persediaan pada tahun 2022.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan pada Tabel 37 berikut ini:

Tabel 37
Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2022	31 Des 2021	Jumlah (Rp)	%
Beban Persediaan Rusak/Usang	0,00	12.930.036,00	(12.930.036,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	12.930.036,00	(12.930.036,00)	(100,00)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp202.170.733.847,00

E.1. Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal per 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2021 adalah masing-masing sebesar Rp202.170.733.847,00 dan Rp202.963.897.501,00.

Surplus/(Defisit) LO
(Rp22.826.966.928,00)

E.2. Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp22.826.966.928,00 dan Rp20.268.695.429,00. Jumlah tersebut merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi) Ekuitas
(Rp42.764,00)

E.3. Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Ekuitas

Jumlah Koreksi Yang Mengurangi Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar minus Rp42.764,00 dan minus Rp3.974.850,00.

Rincian Koreksi Yang Mengurangi Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 38 berikut ini:

Tabel 38
Rincian Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Koreksi atas Reklasifikasi	0,00	(3.974.850,00)
Koreksi Nilai Persediaan	(42.764,00)	0,00
Total	(42.764,00)	(3.974.850,00)

Koreksi atas Reklasifikasi
Rp0,00

E.3.1. Koreksi atas Reklasifikasi

Jumlah Koreksi atas Reklasifikasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan minus Rp3.974.850,00. Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang dihasilkan dari transaksi Reklasifikasi Masuk dan Keluar BMN.

Rincian Koreksi atas Reklasifikasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 39 berikut ini:

Tabel 39
Rincian Koreksi atas Reklasifikasi
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Akm. Penyusutan Peralatan dan Mesin – Reklasifikasi Masuk	0,00	(9.259.800,00)
Akm. Penyusutan Peralatan dan Mesin – Reklasifikasi Keluar	0,00	5.284.950,00
Total	0,00	(3.974.850,00)

Koreksi Nilai
Persediaan
(Rp42.764,00)

E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Jumlah Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar minus Rp42.764,00 dan Rp0,00. Koreksi nilai persediaan merupakan koreksi kesalahan pada saat melakukan proses pendetilan kode barang atas perolehan persediaan.

Transaksi Antar
Entitas
Rp21.542.694.246,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp21.542.694.246,00 dan Rp19.479.506.625,00.

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 40 berikut ini:

Tabel 40s
Rincian Transaksi Antar Entitas
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	21.592.451.586,00	19.411.989.877,00
Diterima dari Entitas Lain	(74.565.500,00)	(110.045.100,00)
Transfer Masuk	47.215.160,00	117.561.848,00
Transfer Keluar	(22.407.000,00)	0,00
Pengesahan Hibah Langsung	0,00	60.000.000,00
Total	21.542.694.246,00	19.479.506.625,00

Ditagihkan ke Entitas
Lain
Rp21.592.451.586,00

E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp21.592.451.586,00 dan Rp19.411.989.877,00. Jumlah per 31 Desember 2022 merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara setelah dikurangi pengembalian belanja sampai dengan 31 Desember 2022.

Diterima dari Entitas
Lain
(Rp74.565.500,00)

E.4.2. Diterima dari Entitas Lain

Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar minus Rp74.565.500,00 dan minus Rp110.045.100,00. Jumlah per 31 Desember 2022 merupakan realisasi penerimaan negara yang telah disetorkan ke Kas Negara setelah dikurangi pengembalian pendapatan sampai dengan 31 Desember 2022.

Transfer Masuk
(Rp47.215.160,00)

E.4.3. Transfer Masuk

Jumlah Transfer Masuk per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp47.215.160,00 dan Rp117.561.848,00. Jumlah per 31 Desember 2022 merupakan nilai buku aset yang diterima dari satuan kerja di lingkungan BPKP berupa aset tetap peralatan dan mesin, dengan rincian sebagai berikut :

Satker Pengirim	Nama Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Perwakilan BPKP Provinsi Riau	Tablet PC	12.990.000,00	6.495.000,00	6.495.000,00
Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa BPKP	LCD Projector/ Infocus	9.750.000,00	1.950.000,00	7.800.000,00
Pusdiklatwas BPKP	Audio Visual	19.550.400,00	11.730.240,00	7.820.160,00
	Note Book	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	Printer	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
Jumlah		67.390.400,00	20.175.240,00	47.215.160,00

Transfer Keluar
(Rp22.407.000,00)

E.4.4. Transfer Keluar

Jumlah Transfer Keluar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar minus Rp22.407.000,00 dan Rp0,00. Jumlah per 31 Desember 2022 merupakan nilai buku aset yang ditransfer ke satuan kerja di lingkungan BPKP berupa aset tetap peralatan dan mesin, dengan rincian sebagai berikut:

Satker Penerima	Nama Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa BPKP	Handphone Encription	16.700.000,00	6.680.000,00	10.020.000,00
	Lap Top	22.146.000,00	16.611.000,00	5.537.000,00
	Tablet PC	13.700.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00
Jumlah		52.548.000,00	30.141.000,00	22.407.000,00

Pengesahan Hibah
Langsung
Rp0,00

E.4.5. Pengesahan Hibah Langsung

Jumlah Pengesahan Hibah Langsung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp60.000.000,00.

Ekuitas Akhir
Rp200.886.418.401,00

E.5. Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp200.886.418.401,00 dan Rp202.170.733.847,00. Jumlah per 31 Desember 2022 merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp200.992.372.368,00 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp105.953.967,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Biaya Bantuan
Kedinasan
Rp850.648.888,00

F.1. Informasi Biaya Bantuan Kedinasan

Selama tahun 2022 kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat selain didanai dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, juga berasal dari mitra kerja. Kegiatan tersebut berupa pendampingan, bimbingan teknis dan sosialisasi berdasarkan permintaan dari Pemerintah Daerah, dan Kementerian/Lembaga dan BUMN/BUMD yang menjadi mitra kerja masing-masing satuan kerja, yang anggarannya tidak tersedia dalam DIPA. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, jumlah penugasan yang dibiayai mitra kerja sebanyak 57 penugasan dan menghasilkan 57 LHP. Adapun realisasi biaya bantuan kedinasan dari mitra kerja sebesar Rp850.648.888,00.

Rincian Biaya Bantuan Kedinasan per 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 41 berikut ini:

Tabel 41
Rincian Biaya Bantuan Kedinasan per 31 Desember 2022

Korwas	Jumlah Penugasan	Jumlah LHP	Jumlah Dana (Rp)
Bidang IPP (Perekonomian)	11	11	272.540.930,00
Bidang IPP (Polhukam)	6	6	
Bidang APD	7	7	84.450.000,00
Bidang AN	28	28	412.784.201,00
Bidang Investigasi	3	3	55.453.757,00
Bidang P3A	2	2	25.420.000,00
Jumlah	57	57	850.648.888,00

Biaya Bantuan Kedinasan seluruhnya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh pihak mitra kerja terkait sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja. Berdasarkan penugasan dari pimpinan unit kerja masing-masing berupa SK Tim Gabungan/Surat Tugas maka diterbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD) Nihil dengan beban anggaran mitra kerja. Pada akhir kegiatan/penugasan, pegawai dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi biaya perjalanan dinas/honorarium, dan selanjutnya dipertanggungjawabkan oleh mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja.